

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ranah persaingan global saat ini telah berubah. Apabila beberapa dekade sebelumnya persaingan global berfokus atas perebutan terhadap wilayah dan sumber daya. Pola persaingan strategis global saat ini jauh lebih kompleks dan beragam, dengan jenis persaingan yang berbeda pada lingkup isu yang berbeda pula. Berbeda dengan konflik atas wilayah dan sumber daya antara negara adikuasa di abad-abad sebelumnya, persaingan saat ini tampak sengit di ranah aturan global, institusi, perdagangan, standar atau teknologi (Lewis, 2018). Salah satu persaingan strategis yang saat ini tengah menjadi perhatian banyak negara adalah persaingan di ranah inovasi teknologi, informasi, dan komunikasi (selanjutnya disebut TIK). Memang di era digitalisasi saat ini, kepemilikan teknologi baru (*new technology*) bagi negara adalah hal yang amat penting. Perkembangan ranah teknologi baru yang banyak diperbincangkan beberapa tahun belakangan adalah seputar *artificial intelligence (AI)*, *machine learning*, *internet of things (IOT)*, hingga teknologi 5G. Negara-negara yang memiliki paten terhadap teknologi baru dan menetapkan standar global atas teknologi tersebut dapat mengambil posisi yang sangat menguntungkan di ranah internasional pada era baru transformasi digital. Persaingan teknologi kemudian menjadi isu yang sedang hangat saat ini, dimana dengan kemajuan zaman membuat perkembangan TIK jauh lebih cepat dan masif daripada sebelumnya.

Amerika Serikat yang pasca Perang Dingin diakui sebagai hegemoni dunia menyadari adanya tantangan berupa persaingan strategis internasional yang semakin intensif, ditandai dengan munculnya kekuatan besar (*great powers*) baru yang dapat mengancam statusnya dalam tatanan internasional. Persaingan kekuatan besar ini memiliki dimensi politik, ekonomi, hingga militer, dengan implikasi yang berpotensi menjangkau kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat. Merespon hal ini, pemerintah Amerika Serikat pada masa Donald Trump membingkai lanskap geopolitik global yang ada terutama sebagai bentuk persaingan strategis dengan dua negara pesaing utama yaitu Tiongkok dan Rusia. Dalam *National Security Strategy of the United States of America* (NSS) tahun 2017 disebutkan bahwa:

China and Russia challenge American power, influence, and interests, attempting to erode American security and prosperity. They are determined to make economies less free and less fair, to grow their militaries, and to control information and data to repress their societies and expand their influence... [these challenges] are fundamentally contests between those who value human dignity and freedom and those who oppress individuals and enforce uniformity (NSS, 2017).

Terkait dengan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Saat ini kedua negara ini berada di tengah persaingan terbaru untuk memperebutkan dominasi terhadap teknologi baru yang sedang dikembangkan yaitu teknologi 5G.

Pengembangan teknologi 5G sebagai revolusi dari generasi jaringan internet sebelumnya (4G) menjadi perdebatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Keduanya saling berlomba untuk menjadi negara yang mendominasi dalam pengembangan teknologi 5G yang nantinya dapat memiliki kekuasaan untuk menentukan penetapan standar, permasalahan paten, dan rantai pasokan global dari

infrastruktur teknologi 5G. Polemik menjadi semakin ketat karena diketahui bahwa Tiongkok saat ini telah memimpin dalam pengembangan 5G melalui investasi agresif dan dukungan yang kuat dari negara terhadap perkembangan teknologi melalui kebijakan nasional pemerintah. Sementara itu, apabila dilihat secara historis, inovasi jaringan internet selama ini didominasi oleh Amerika Serikat dan negara Barat lainnya. Mulai dari penemuan internet pertama kali yang dikembangkan oleh *U.S. Department of Defense Advanced Research Projects Agency* (ARPA) melalui program jaringan komputer berskala luas, ARPANET, yang kemudian menjadi cikal bakal jaringan internet modern saat ini. Sampai dengan inovasi jaringan 4G yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat. Ambisi Tiongkok dalam pengembangan teknologi terbaru 5G ini kemudian dilihat sebagai ancaman bagi kepemimpinan Amerika Serikat dalam pengembangan TIK, termasuk jaringan internet 5G.

Sejauh ini dua perusahaan teknologi asal Tiongkok yaitu Huawei dan ZTE menjadi yang teratas dalam pengembangan infrastruktur 5G di sejumlah negara di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Perusahaan-perusahaan Tiongkok ini telah memegang sekitar sepertiga dari *standard essential patent* (SEP) terkait teknologi 5G di seluruh dunia, dipimpin oleh Huawei yang memiliki portofolio SEP terbesar untuk teknologi 5G (Pohlmann, 2019). Kepemimpinan perusahaan teknologi ini ditambah dengan kekhawatiran Amerika Serikat yang telah berlangsung lama atas dugaan pencurian data dan kekayaan intelektual yang dilakukan perusahaan teknologi ini, serta diduga berhubungan dengan pemerintah Tiongkok telah meningkatkan kekhawatiran akan keamanan bagi Amerika Serikat.

Pemerintah Amerika Serikat pertama kali menyuarakan kekhawatiran akan keamanan nasional atas peralatan Huawei pada tahun 2012, menyusul penyelidikan Kongres yang menyimpulkan bahwa peralatan Huawei merupakan ancaman. Sejak saat itu, kekhawatiran keamanan nasional terkait Huawei terus meningkat, yang berpuncak pada tuduhan bahwa Huawei mencuri kekayaan intelektual dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Pemerintah Barack Obama merespon ancaman ini dengan langkah kooperatif melalui perjanjian kerjasama *cyber security* dengan Tiongkok yang disepakati kedua negara tahun 2015 lalu (Knake, 2015).

Pendekatan Amerika Serikat dalam merespon isu keamanan siber berubah seiring dengan pergantian kekuasaan ke tangan Donald Trump. Pemerintahan Trump cenderung merespon isu ini dengan langkah yang lebih keras. Pemerintah Amerika Serikat kemudian membuat sejumlah kebijakan strategis sebagai bentuk respon terhadap kekhawatiran akan keamanan teknologi 5G dari perusahaan asal Tiongkok. Pada 29 April 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengumumkan kebijakan *5G Clean Path* yang disebut merupakan bagian dari *National Defense Authorization Act* tahun 2019. *5G Clean Path* adalah jalur komunikasi *end-to-end* yang tidak menggunakan transmisi, kontrol, komputasi, atau peralatan penyimpanan apapun dari vendor TIK yang tidak terpercaya, seperti Huawei dan ZTE. *5G Clean Path* ini diwajibkan terhadap semua lalu lintas jaringan 5G yang masuk dan keluar dari fasilitas diplomatik AS di dalam dan luar negeri (U.S. Department of State, n.d.). Kemudian pada Juni 2020, Amerika Serikat secara resmi menunjuk Huawei dan ZTE sebagai ancaman keamanan nasional (FCC, 2020).

Program *Clean Path* selanjutnya diperluas tidak hanya mengenai lalu lintas jaringan 5G namun juga ke beberapa bidang lainnya yang berkaitan dengan TIK. Tepatnya pada bulan Agustus 2020, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan perluasan tersebut melalui inisiatif program *The Clean Network*. Istilah “*Clean Network*” pertama kali diperkenalkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan—Keith Krach. Dilansir dari situs resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, program ini disebut sebagai pendekatan komprehensif pemerintahan Trump untuk melindungi privasi warga dan informasi sensitif milik perusahaan dan pemerintah Amerika Serikat dari gangguan agresif “aktor jahat”, seperti Partai Komunis Tiongkok (PKT) (U.S. Department of State, 2020). Selain digunakan untuk mengamankan jaringan 5G, program ini juga dibuat sebagai upaya untuk melawan pengaruh Tiongkok di dalam jaringan telekomunikasi Amerika Serikat. Adapun dalam program jaringan bersih ini mengatur perluasan dengan lima elemen tambahan yang keseluruhannya secara eksplisit ditujukan untuk menghambat pergerakan perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok yang kini sedang melakukan ekspansi teknologi dan internet secara global. Elemen-elemen dalam inisiatif *Clean Network* adalah sebagai berikut:

1. *Clean Path*: jalur komunikasi *end-to-end* yang tidak menggunakan transmisi, kontrol, komputasi, atau peralatan penyimpanan apapun dari vendor TIK yang tidak terpercaya, seperti Huawei dan ZTE.

2. *Clean Carrier*: memastikan operator yang tidak terpercaya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tidak terhubung dengan jaringan telekomunikasi Amerika Serikat.
3. *Clean Store*: menghapus aplikasi tidak terpercaya dari *apps store* di Amerika Serikat. Aplikasi yang berasal dari RRT mengancam privasi, menyebarkan virus, dan menyebarkan propaganda serta disinformasi. Informasi pribadi dan bisnis Amerika Serikat yang paling sensitif harus dilindungi dari eksploitasi dan pencurian data untuk kepentingan Partai Komunis Tiongkok (PKT).
4. *Clean Apps*: mencegah produsen ponsel pintar dari RRT yang tidak terpercaya melakukan pra-pemasangan atau menyediakan untuk diunduh aplikasi terpercaya di toko aplikasi mereka. Huawei adalah perpanjangan tangan negara pengawas RRT, yang memperdagangkan inovasi dan reputasi perusahaan Amerika Serikat dan perusahaan asing terkemuka lainnya.
5. *Clean Cloud*: mencegah informasi pribadi paling sensitif warga Amerika Serikat dan kekayaan intelektual dari bisnis Amerika Serikat yang paling berharga, termasuk penelitian mengenai vaksin *COVID-19*, yang disimpan dan diproses di sistem berbasis *cloud* yang dapat diakses oleh musuh asing kami melalui perusahaan seperti Alibaba, Baidu, dan Tencent.
6. *Clean Cable*: memastikan kabel bawah laut yang menghubungkan Amerika Serikat ke internet global tidak di subversi untuk pengumpulan intelijen oleh RRT dalam skala yang sangat tinggi. Kami juga akan bekerja dengan mitra

asing untuk memastikan bahwa kabel bawah laut di seluruh dunia juga tidak dapat disusupi (U.S. Department of State, n.d.).

Dilihat dari isi *Clean Network* tersebut, secara gamblang menunjukkan bahwa program ini dibentuk untuk melawan Tiongkok dengan menuduh perusahaan teknologi asal negara tersebut sebagai “aktor jahat” yang melakukan kejahatan siber seperti pencurian data pribadi dan kekayaan intelektual milik perusahaan Amerika Serikat demi kepentingan pemerintah Tiongkok. Teknologi dan jaringan internet dari perusahaan Tiongkok dicap sebagai sesuatu yang tidak terpercaya, penyebar virus, penyebar propaganda dan disinformasi, hingga mengancam privasi. Tentunya program ini sangat mendiskreditkan TIK asal Tiongkok dengan konotasi yang negatif.

Inisiatif kebijakan *Clean Network* ini tidak hanya diterapkan di dalam negeri, tetapi kemudian juga digunakan Amerika Serikat dalam membangun aliansi global untuk mengecualikan perusahaan TIK dari Tiongkok yang dianggap Washington sebagai “pintu belakang” pemerintah komunis Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G secara global. Program ini dipercaya sebagai pendekatan nasional dan regional untuk membentuk kerjasama internasional, yang lebih mengandalkan kepercayaan—perubahan yang cukup mencolok dari strategi Trump dalam “*America First*” yang lebih mengedepankan pendekatan unilateralisme dan isolasionisme. Pemerintah Trump mengklaim telah terdapat tiga puluh negara yang bergabung dalam inisiatif *Clean Network* besutannya tersebut. Negara-negara yang diklaim oleh Amerika Serikat telah ikut bergabung dalam *Clean Network* antara lain Albania, Australia, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Prancis,

Yunani, Israel, Jepang, Latvia, Norwegia, Polandia, Rumania, Slovenia, Swedia, Taiwan, Inggris, hingga Vietnam. Beberapa perusahaan TIK di sejumlah negara juga disebutkan telah bergabung dalam program ini dan menjadi “perusahaan bersih” atau “*Clean Telcos*” yang menolak kerjasama bisnis dengan “alat” PKT, seperti Huawei. *Clean telcos* ini diantaranya Orange dari Prancis, SK dan KT dari Korea Selatan, Telstra di Australia, dsb. Pemerintah Tiongkok kemudian memberikan tanggapan dengan menentang keras inisiatif “jaringan internet bersih” ini. Tiongkok menilai Amerika Serikat sedang melakukan diskriminasi pada perusahaan teknologi Tiongkok di luar negeri. Dengan dikeluarkannya program ini menjadi babak baru dari fenomena rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang sudah terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Lebih lanjut, dengan dikeluarkannya inisiatif global ini semakin mempertegas ketegangan geopolitik kedua negara, khususnya dalam ranah teknologi dan jaringan internet.

Isu mengenai persaingan 5G antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini dapat dikatakan tergolong baru, namun telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai topik ini. Jurnal penelitian dari Bayuaji Pradipta Arinanda yang berjudul “Perang Dagang Amerika Serikat vs Tiongkok: Kebijakan Penolakan Teknologi 5G Tiongkok oleh Amerika Serikat” menganalisis kasus ini dengan menggunakan teori realisme ofensif. Dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan penolakan teknologi 5G Tiongkok oleh Amerika Serikat disebabkan karena adanya perang dagang dan hal ini dilakukan sebagai salah satu cara dari Amerika Serikat untuk melindungi keamanan ekonomi domestik dan mempertahankan hegemoni terhadap penguasaan teknologi global

(Arinanda et al., 2022). Selanjutnya terdapat jurnal yang ditulis oleh Kim Mi-jin, Lee Heejin, dan Kwak Jooyoung yang berjudul “*The Changing Patterns of China’s International Standardization in ICT under Techno-nationalism: A Reflection through 5G Standardization*”. Penelitian dalam jurnal ini berfokus pada usaha Tiongkok untuk melakukan standarisasi dari teknologi 5G. Dimana argumen utamanya adalah bahwa kebijakan sains dan teknologi nasional Tiongkok, salah satunya mengenai teknologi 5G ini, telah merubah strategi nasional Tiongkok dari “*catch-up*” menjadi “*first-move*” dan akan terus bertransformasi dalam kerangka nasionalisme teknologi (Kim et al., 2020). Sementara itu, Andrew Stephen Champion, dalam jurnalnya yang berjudul “*From CNOOC to Huawei: securitization, the China threat, and critical infrastructure*” menggunakan teori sekuritisasi dari Mazhab Kopenhagen untuk menganalisis topik mengenai persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dimana, dalam tulisannya, Champion dengan menggunakan analisis diskursus menemukan bahwa Tiongkok telah ditunjuk sebagai ancaman eksistensial oleh Amerika Serikat sejak 2005 dengan *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) hingga yang terbaru mengenai Huawei (Champion, 2020). Sayangnya, meskipun ketiga karya tersebut telah menganalisis dan menjelaskan isu persaingan 5G antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di antara mereka masih belum ada yang secara spesifik menganalisis mengenai kebijakan proteksi jaringan internet 5G pada masa pemerintahan Donald Trump dengan menggunakan kacamata realisme neoklasik yang menekankan pada faktor struktur sistem internasional dan domestik dalam menjelaskan perilaku penolakan ini. Karenanya penelitian ini dapat menawarkan perspektif baru untuk

menganalisis isu terkait kebijakan dalam persaingan 5G antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik sebuah rumusan masalah yakni: **“Mengapa Amerika Serikat menerapkan kebijakan *Clean Network* dalam merespon rivalitasnya dengan Tiongkok pada ranah pengembangan teknologi 5G?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat memilih untuk menerapkan *Clean Network* dalam menanggapi rivalitasnya dengan Tiongkok pada ranah pengembangan 5G.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang mencakup:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sosial, terutama ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan perspektif alternatif yaitu melalui kacamata realisme neoklasik dalam melihat isu persaingan teknologi 5G, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dari peran faktor struktur sistem internasional dan domestik. Dikarenakan penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan teori neorealisme dan sekuritisasi dalam menganalisis isu serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dan dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan acuan terhadap isu mengenai perkembangan teknologi baru yaitu 5G yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori Realisme Neoklasik untuk mengamati faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat menerapkan kebijakan proteksi jaringan 5G melalui “*Clean Network*” dalam menanggapi rivalitasnya dengan Tiongkok pada ranah pengembangan teknologi 5G.

Realisme Neoklasik tidak berdiri secara independen, melainkan hadir sebagai teori turunan dari *grand theory* yaitu realisme. Realisme sendiri telah lama menjadi paradigma dominan yang banyak digunakan oleh penstudi hubungan internasional (HI). Realisme memiliki asumsi dasar dalam melihat politik internasional yaitu bahwa aktor terpenting dalam hubungan internasional adalah negara yang beroperasi sebagai unit independen dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas terpusat, dan secara rasional mengejar kepentingan pribadi untuk menjamin kekuasaan dan keamanan mereka. Dalam perkembangannya realisme terbagi menjadi beberapa aliran pemikiran yaitu realisme klasik, realisme struktural (neorealisme), dan realisme neoklasik.

Aliran pertama, realisme klasik, berusaha memahami perilaku negara dengan menitikberatkan analisisnya pada faktor domestik sebagai penentu kebijakan suatu negara. Morgenthau (1946) berpendapat bahwa perilaku negara ditentukan oleh

sifat dasar manusia sebagai *animus dominandi* yang haus akan kekuasaan. Sehingga menurutnya, tujuan utama negara adalah meraih kekuasaan. Realisme klasik mengedepankan analisis pada faktor domestik saja disebabkan karena pandangan utamanya yang melihat sifat alamiah manusia yang jahat, dan mengesampingkan faktor eksternal dari sistem internasional.

Aliran kedua, realisme struktural (neorealisme), yang lebih menitikberatkan analisisnya untuk melihat perilaku negara pada faktor posisi negara dalam sistem internasional. Menurut Waltz (1979), setiap negara berusaha untuk bertahan karena sistem internasional berjalan secara anarkis—kondisi yang dihasilkan sebab tidak adanya otoritas sentral yang dapat mengatur perilaku masing-masing negara. Senada dengan Waltz, Mearsheimer (2001), berpendapat bahwa struktur sistem internasional inilah yang menentukan bagaimana negara berperilaku, bagaimana cara mereka memandang satu sama lain dan ini bisa berakibat pada apa yang disebut dengan anarki internasional.

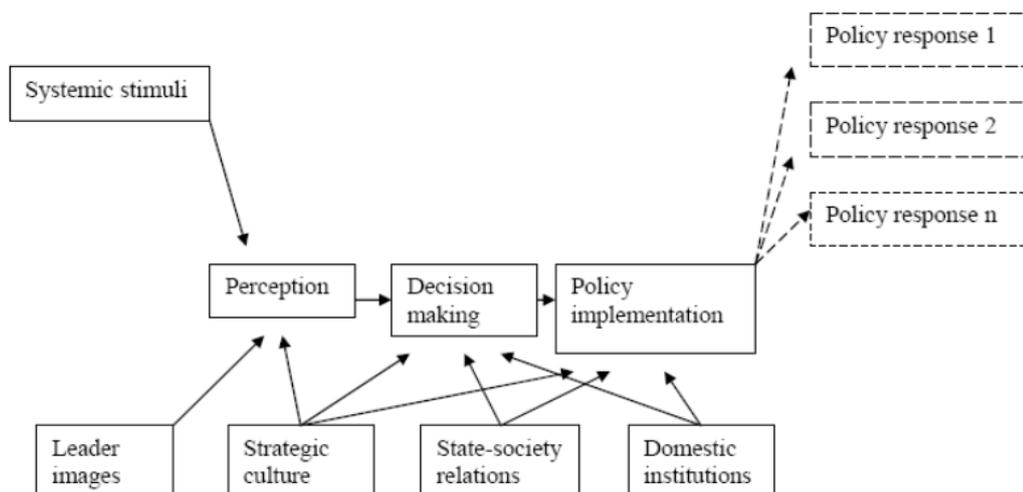
Aliran terakhir adalah realisme neoklasik, yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini. Istilah realisme neoklasik pertama kali diperkenalkan oleh Gideon Rose dalam artikelnya yang berjudul “*Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*” tahun 1998. Sama halnya dengan aliran lain dalam realisme, realisme neoklasik juga mengasumsikan bahwa politik adalah perjuangan terus-menerus di antara banyak negara untuk mendapatkan kekuasaan dan keamanan di dunia dengan sumber daya yang terbatas dan penuh ketidakpastian. Realisme neoklasik dapat dikatakan berusaha untuk mengisi *gap* yang ada pada realisme klasik dan neorealisme. Yang mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya

bahwa realisme klasik hanya berfokus pada analisis unit (faktor domestik) dan mengesampingkan faktor eksternal (struktur internasional), sementara neorealisme sebaliknya. Realisme Neoklasik menggabungkan elemen-elemen analisis dari neorealisme dan realisme klasik sebab dua teori tersebut dianggap realisme neoklasik sebagai teori yang kurang lengkap. Oleh sebab itu, untuk memahami perilaku suatu negara dalam hubungan internasional, realisme neoklasik memasukan variabel struktur sistem internasional (anarki dan distribusi kapabilitas) dan variabel unit (faktor domestik) (Rosyidin, 2020). Sehingga teori ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara.

Realisme neoklasik sependapat dengan neorealisme bahwa negara membentuk kebijakan luar negeri terutama disebabkan karena adanya ancaman dan peluang yang muncul pada sistem internasional, yang mana kemudian membentuk berbagai pilihan pada kebijakan setiap negara. Perbedaannya, realisme neoklasik berusaha untuk menghidupkan kembali realisme klasik yang menggunakan analisis unit domestik untuk memahami perilaku suatu negara. Seperti yang ditunjukkan Gideon Rose, realisme neoklasik berbeda dari neorealisme karena adanya penggabungan variabel intervensi domestik yang mengkondisikan seperti apa dan bagaimana tindakan negara dalam menanggapi tekanan sistemik struktur internasional. Menurut Gideon Rose, ambisi dan ruang lingkup dari kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan oleh posisinya dalam struktur sistem internasional dan juga kapabilitas kekuatan yang dimiliki. Dampak dari kapabilitas kekuatan bersifat kompleks dan tidak langsung sehingga hanya dapat dijelaskan melalui *intervening*

variable pada level unit (faktor domestik). Variabel domestik yang sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah persepsi elit politik yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut. Hal ini membuat pada akhirnya masing-masing negara dapat mengambil strategi dan kebijakan yang berbeda meskipun dihadapkan pada *structural constraint* yang sama (Rose, 1998).

Untuk lebih memahami arah penjelasan dari realisme neoklasik dapat melihat model Realisme Neoklasik dari Ripsman, Taliaferro dan Lobell.



Gambar 1.1. Model Realisme Neoklasik terhadap Kebijakan Luar Negeri

Sumber: Norrin M. Ripsman, Jeffrey W. Taliaferro, Lobell (2016)

Model Realisme Neoklasik di atas kemudian dapat dijelaskan dengan membaginya ke dalam tiga variabel yaitu *independent variable*, *intervening variable*, serta *dependent variable* yang dijabarkan sebagai berikut:

Independent variable

Independent variable dalam realisme neoklasik adalah *systemic stimuli* (rangsangan/tekanan sistemik) dari struktur internasional. Hal inilah yang menjadi awal dalam menganalisa mengenai faktor yang mempengaruhi terbentuknya

kebijakan luar negeri suatu negara yaitu karena adanya rangsangan atau tekanan struktural dan posisi negara dalam sistem internasional yang anarki.

Intervening variable

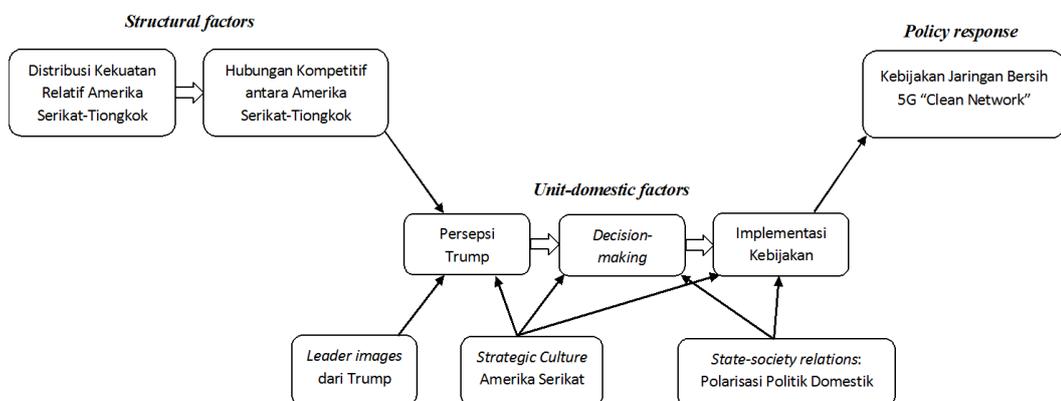
Tekanan sistemik dari struktur internasional tadi selanjutnya perlu diterjemahkan di dalam ranah domestik negara oleh aktor pembuat kebijakan luar negeri atau dapat disebut sebagai *foreign policy executive* (FPE) yang dapat meliputi presiden, perdana menteri, anggota kabinet, menteri, dan penasihat yang secara resmi mengemban tugas untuk memegang urusan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Seperti diilustrasikan dalam bagan di atas, dimana pembuat kebijakan menyusun kebijakan luar negeri agar sesuai dengan tekanan sistemik yang diterima negara, pemilihan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel yang ada dalam proses politik di tingkat domestik seperti *perception* (persepsi dari aktor pembuat kebijakan), *decision making* (proses pengambilan keputusan), dan *policy implementation* (implementasi dari kebijakan yang diambil). Proses dalam politik domestik tersebut merupakan respons yang berpotensi dapat mendistorsi kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh sebab itu, meskipun beberapa negara mendapatkan tekanan struktur sistem internasional yang sama, terdapat kemungkinan besar bahwa kebijakan luar negeri yang diambil oleh masing-masing negara tersebut akan berbeda karena dipengaruhi oleh faktor di ranah domestik. Proses politik di tingkat domestik ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penghubung lainnya pada tingkat unit (domestik) yaitu:

- (1) Keakuratan atau ketepatan persepsi dari pembuat kebijakan terhadap tekanan struktur sistem internasional yang dapat dipengaruhi oleh *leader images* (citra pemimpin) dan *strategic culture* (budaya strategis);
- (2) Kemampuan negara dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dapat dikondisikan secara domestik oleh *strategic culture* (budaya strategis), *state-society relations* (hubungan negara-masyarakat), dan *domestic institutions* (institusi politik domestik).

Dependent variable

Variabel berpengaruh (*dependent variable*) dalam pendekatan realisme neoklasik diidentifikasi sebagai bentuk respons negara berupa kebijakan luar negeri yang diambil karena adanya *systemic stimuli* dan variabel dalam politik domestik.

Dengan mengelaborasi skema dari Ripsman, Taliaferro dan Lobell di atas, maka bentuk skema kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan dengan lebih sederhana sebagai berikut:



Gambar 1.2. Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar skema kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa *Clean Network* merupakan *output* kebijakan negara yang dipilih pemerintah Amerika Serikat karena disebabkan adanya faktor struktural dan domestik dalam ranah persaingan pengembangan teknologi 5G global. Faktor struktur dalam hal ini dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan dan rivalitas yang ditemui negara dalam sistem internasional yang kemudian menjadi tekanan eksternal bagi pembuat kebijakan negara. Amerika Serikat disini menghadapi ancaman dalam menjaga hegemoni dan keamanan nasional, khususnya di ranah pengembangan teknologi dan keamanan, dengan kehadiran perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menjadi pemimpin dalam pengembangan 5G di sejumlah kawasan Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika Selatan. Hal ini kemudian meningkatkan kekhawatiran Amerika Serikat apabila Tiongkok dapat menjadi negara pemimpin pengembangan 5G, maka dikhawatirkan pemerintah Tiongkok dapat memiliki akses “pintu belakang” untuk mengumpulkan informasi intelijen yang dapat mengancam keamanan nasional dari negara-negara yang memilih menggunakan teknologi 5G dari Tiongkok. Selanjutnya, tekanan eksternal ini diterjemahkan di ranah politik domestik oleh aktor pembuat keputusan. Dalam hal ini, persepsi dari pemimpin negara sangat berpengaruh. Donald Trump, sudah lama dikenal memiliki persepsi yang negatif terhadap Tiongkok. Hal ini terlihat dalam bukunya yang berjudul *Crippled America* (2015), Trump menyebut Tiongkok sebagai musuh. Persepsi negatif ini dapat juga dipengaruhi oleh *leader images* dan juga *strategic culture* Amerika Serikat. Selain itu, adanya sejarah hubungan yang buruk antara Amerika Serikat dengan perusahaan asal Tiongkok, khususnya Huawei, yang beberapa kali

diduga telah melakukan serangan siber untuk mencuri kekayaan intelektual milik Amerika Serikat. Sehingga kemudian menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan yang mengakar terhadap teknologi dan perusahaan Tiongkok. Kedua faktor ini, struktural dan domestik, pada akhirnya menghasilkan respons kebijakan strategis berupa dikeluarkannya inisiatif *Clean Network* oleh Amerika Serikat pada tahun 2020.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Faktor Struktural

Faktor struktural dalam teori realisme neoklasik adalah sistem internasional yang diidentifikasi sebagai *independent variable* dalam analisis kebijakan luar negeri. Menurut Gideon Rose (1998), ruang lingkup dan ambisi dari kebijakan luar negeri suatu negara pada tahap awalnya didorong oleh posisinya dalam sistem internasional. Konsep sistem internasional pada variabel independen ini diadopsi dari pendekatan realisme struktural (neorealisme) yang melihat bahwa perilaku suatu negara akan menyesuaikan dengan posisinya dalam sistem internasional.

1.6.1.2 Faktor Domestik

Faktor domestik dalam realisme neoklasik digunakan sebagai *intervening variable* yang kemudian membedakan teori ini dengan realisme struktural (neorealisme). Sebagaimana diidentifikasi oleh Rose (1998), bahwa realisme neoklasik berbeda dari realisme struktural, perbedaan ini terlihat dari realisme neoklasik yang menggabungkan variabel domestik untuk mengamati bagaimana negara menanggapi tekanan sistemik internasional yang dianggap mendasari kebijakan luar negeri, *grand strategy*, dan politik internasional. Faktor politik

domestik seperti persepsi elit dalam proses pengambilan keputusan di tingkat domestik hingga implementasi kebijakan menjadi faktor penting yang menghubungkan antara rangsangan sistemik dari struktur internasional dan kebijakan luar negeri yang dibuat.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Faktor Struktur

Sejalan dengan asumsi dasar realisme neoklasik untuk menjelaskan perilaku suatu negara, pertama-tama dengan menggunakan faktor struktur (eksternal) yaitu distribusi kekuatan relatif antar negara dalam sistem internasional. Pergeseran kekuasaan dapat memunculkan sifat yang semakin kompetitif dari hubungan antar negara. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai peluang maupun ancaman tergantung dari variabel intervensi domestik. Penelitian ini akan berfokus pada adanya pergeseran distribusi kekuasaan ekonomi dan teknologi global antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

1.6.2.2 Faktor Domestik

Tekanan sistemik perlu diterjemahkan dan dinilai oleh faktor politik domestik. Dalam penelitian ini terdapat tiga unsur dalam analisis faktor politik domestik yaitu proses persepsi dari aktor pembuat kebijakan (dalam hal ini Presiden Trump), proses *decision-making*, serta implementasi kebijakan. Menurut Ripsman (2016), proses persepsi ini menjadi fase pertama dalam faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Proses persepsi ini juga dipengaruhi oleh faktor *leader images* dan budaya strategis yang membantu seorang pemimpin untuk membentuk persepsinya dalam melihat suatu fenomena internasional sebagai sebuah ancaman atau peluang. Proses pengambilan keputusan (*decision-making*

process) menjadi fase selanjutnya dimana pembuat kebijakan memutuskan seperti apa seharusnya kebijakan luar negeri yang tepat. Menurut Ripsman (2016), proses pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh tingkat polarisasi politik domestik. Selanjutnya, proses implementasi adalah fase terakhir dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri, sehingga mengarah pada respons kebijakan luar negeri yang sebenarnya.

1.7 Hipotesis

Berdasarkan dengan perspektif realisme neoklasik, penulis memiliki argumentasi awal bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat menerapkan kebijakan proteksi jaringan internet 5G melalui “*Clean Network*” disebabkan adanya peran faktor tekanan struktural dalam sistem internasional berupa pergeseran kekuasaan ekonomi hingga teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang kemudian menimbulkan tendensi persaingan antar kedua negara semakin kompetitif. Selanjutnya tekanan sistemik ini diterjemahkan oleh faktor politik domestik, khususnya terkait persepsi dari Donald Trump sebagai kepala negara yang memegang jabatan eksekutif dalam ranah kebijakan luar negeri dan pertahanan, yang memandang kemajuan Tiongkok di bidang ekonomi dan TIK sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional. Selain itu, adanya faktor dukungan secara domestik dalam politik domestik juga mempengaruhi pemilihan kebijakan dan agenda perdagangan yang restriktif terhadap perusahaan teknologi Tiongkok.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini deskriptif-eksplanatif. Dimana dalam penelitian ini, penulis tidak hanya memberikan gambaran atau deskripsi sistematis mengenai fenomena yang diteliti, melainkan juga akan melakukan interpretasi antara teori dan fenomena yang terjadi, sehingga dapat menjelaskan sebab dan akibat sebuah fenomena dapat terjadi berdasarkan tinjauan teori begitupun sebaliknya.

1.8.2 Sumber Data

Data dari penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder (data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya), berupa dokumen-dokumen pemerintah dan studi literatur dari buku, jurnal, artikel, dan laporan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik *literature research* atau tinjauan pustaka. Dimana penulis akan melakukan penelaahan, evaluasi, dan analisis terhadap rilis resmi pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok melalui situs resmi dan dokumen pemerintah, berbagai literatur, buku, jurnal, dan laporan atau berita yang kredibel dan berkaitan dengan permasalahan atau fenomena dalam penelitian ini.

1.8.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini mengikuti langkah yang dijelaskan oleh Burhan Bungin (2003) yaitu: (1) Pengumpulan data (*data collection*) dengan menggunakan tinjauan pustaka; (2) Reduksi data (*data reduction*) sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang tersedia; (3) Penyajian data (*display data*) sebagai proses penyusun sekumpulan informasi dengan melalui teks naratif, bagan, tabel, dan sebagainya; (4) Verifikasi dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan desain riset dari penelitian berupa pendahuluan, yang menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, operasionalisasi konsep, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian pembahasan terkait gambaran umum yang mendeskripsikan mengenai sejarah kebangkitan perusahaan Tiongkok dalam persaingan terkait pengembangan teknologi 5G (atau disebut juga *5G race*) dengan Amerika Serikat.

Bab III akan membahas mengenai analisis variabel struktur sistem internasional dan analisis variabel domestik berupa proses persepsi dari elit-elit politik eksekutif Amerika Serikat (khususnya Presiden Donald Trump) yang melihat kemajuan Tiongkok khususnya di bidang teknologi dan internet sebagai ancaman terbesar bagi keamanan siber Amerika Serikat, proses *decision-making*, serta proses implementasi kebijakan yang pada akhirnya menghasilkan *output* kebijakan berupa *Clean Network* untuk mengamankan jaringan internet mereka.

Bab IV merupakan bab penutup yang akan menjelaskan kesimpulan dan saran-saran penelitian lebih lanjut.